



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG OLAHRAGA
KOMISI X DPR RI
KE KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022
10 S.D. 12 SEPTEMBER 2021**

I. PENDAHULUAN

PON XX Papua yang sedianya diselenggarakan pada bulan Oktober – November 2020, tertunda satu tahun akibat pandemi Covid-19. PON XX Papua akhirnya akan dilaksanakan pada Oktober - November 2021, dan perlu mendapat perhatian lebih karena dilaksanakan di tengah pandemi *Covid-19*. Kesuksesan PON XX di Jayapura, Mimika dan Merauke, sangat penting bagi terselenggaranya *sport for all* dan proses pembibitan atlet. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI perlu mendapatkan data dan melihat kondisi langsung terkait persiapan dan kesiapan PON XX Papua, dan mengagendakan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Olahraga ke Kabupaten Mimika.

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
4. PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
5. PP Nomor 7 Tahun 2020 tentang Revisi PP No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.
6. PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.
7. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
8. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 18 Agustus 2021 tentang Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Olahraga pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.

b. Maksud dan Tujuan

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Olahraga Komisi X DPR RI ke Kabupaten Mimika bertujuan untuk mendorong persiapan pelaksanaan PON XX Tahun 2021, sehingga dapat meraih sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pemberdayaan ekonomi, sukses administrasi penyelenggaraan, sukses memasyarakatkan olahraga dan sukses pasca *event*.

c. Agenda Kunjungan

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Olahraga Komisi X DPR RI ke Kabupaten Mimika dilaksanakan dari tanggal 10 s.d. 12 September 2021. Agenda Kunjungan kerja ini adalah:

1. Pertemuan dengan pemangku kepentingan bidang olahraga dan PON XX Papua di Kabupaten Mimika:
 - a. Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Ir. Syahrial, MM.
 - b. Ketua Harian Sub PB PON XX Klaster Mimika, Marthen Paiding.
 - c. Perwakilan PT Freeport Indonesia Mimika Sport Complex (MSC) Oky Okyana.
 - d. Pemangku kepentingan olahraga lainnya di Kabupaten Mimika.
2. Kunjungan Lapangan ke Mimika Sport Complex (MSC) Kabupaten Mimika.

d. Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Olahraga Komisi X DPR RI ke Kabupaten Mimika Papua dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP (A-338/F.PG). Tim didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, Wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI, serta Pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, yaitu: Dr. Jonni Mardizal, M.M. (Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan), Hj. Suryati, S.Sos., M.Si. (Staf Ahli Bidang Hukum), dan Drs. Maifrizon, M.Si. (Asdep Pengelolaan Olahraga Rekreasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga).

II. TEMUAN

Pertemuan dengan pemangku kepentingan PON XX di Mimika *Sport Center*.

- 1) Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Ir. Syahrial, M.M. menyampaikan beberapa catatan terkait kesiapan Mimika sebagai tuan rumah PON XX antara lain:
 - a. Pemda Mimika sangat merespon persiapan PON XX sejak tahun 2016 setelah berakhirnya pelaksanaan PON di Jawa Barat. Pemkab telah merealisasikan anggaran Rp.1,6 Triliun untuk membangun infrastruktur fasilitas pertandingan. Infrastruktur pertandingan yang disiapkan di Kabupaten Mimika akan digunakan untuk menggelar sekitar 150 pertandingan dari 39 Cabang Olahraga.
 - b. Terkait anggaran, saat ini masih ada kendala diantaranya belum cairnya Rp.1,4 Triliun yang belum dikirim Pemerintah Pusat, untuk kebutuhan konsumsi, akomodasi, dan lain-lain. Kendala ini akan segera diatasi melalui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Kendala harus segera diatasi mengingat 23 September 2021 sudah mulai ada pertandingan.
 - c. Terkait pelibatan UMKM daerah, ada kendala untuk menghadirkan produk-produk kreatif, karena minimnya fasilitas dan sumber daya manusia untuk memproduksi *merchandise*/buah tangan kreatif PON XX Papua. Sampai saat ini belum ada *merchandise* PON XX Papua di Timika.
 - d. Terkait protokol kesehatan, Pemkab Mimika telah mendorong dan melaksanakan vaksinasi bagi masyarakat untuk pengendalian pandemi. Hal ini sangat penting untuk menghindari Timika menjadi klaster baru dalam penyebaran Covid-19, mengingat pelaksanaan PON Papua akan menghadirkan penonton.

- 2) Ketua Harian Sub PB PON XX Klaster Mimika, Marthen Paiding, menyampaikan antara lain sebagai berikut:
 - a. Kluster penyelenggaraan PON XX ada di 4 (empat) wilayah, yaitu Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika. Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan pelaksanaan PON XX dari pusat dan juga dari daerah.
 - b. Di klaster Kabupaten Mimika, terdapat 9 (sembilan) venue pertandingan, antara lain untuk disiplin olahraga Aeromodelling, Terbang Layang, Terjun Payung, Atletik, Bola Basket, Billiard, Panjat Tebing, Futsal, Bola Tangan, Judo, dan Tarung Drajat.
 - c. Dari sisi persiapan, bidang pengadaan peralatan tanding sudah siap, baik yang bersumber sumber APBD maupun peralatan yang bersumber dari Kemenpora (APBN). Kami hanya menerima peralatan saja untuk mengadakan pertandingan, yang akan datang tepat pada waktunya.
 - d. Bimbingan Teknik bagi SDM pelaksana, sudah dilaksanakan untuk meningkatkan mutu layanan pelaksana PON XX. Sementara terkait akomodasi transportasi, terdapat bantuan bus 67 (enampuluh tujuh) bantuan dari Kementerian Perhubungan.
 - e. PB PON XX di Mimika masih perlu dukungan kesiapan akomodasi, karena Kabupaten Mimika merupakan daerah berkembang. Pelaksanaan PON XX di Mimika diharapkan mampu memicu pertumbuhan bisnis hotel dan penginapan. Pemda telah membooking hotel-hotel dan merehabilitasi beberapa penginapan, termsuk memperbaiki sarana-sarana pendukung lain seperti jalan dan fasilitas umum lain.
 - f. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PON XX Papua, kegiatan sosial dan even budaya juga disiapkan. Setiap venue disiapkan tempat untuk UMKM dan Ekraf masyarakat lokal. Penyambutan kedatangan rombongan atlet dan kegiatan pengalungan medali akan menampilkan atraksi-atraksi budaya lokal.
 - g. Sampai saat ini, kami masih terdapat kendala pengadaan atribut seperti spanduk dan baliho pendukung sosialisasi PON di Mimika yang mahal dan lambat. Namun kami berkomitem untuk dalam seminggu ke depan akan mulai semarak dengan baliho dan spanduk PON XX Papua.
- 3) Perwakilan PT Freeport Indonesia Mimika Sport Complex (MSC) Oky Okyana, menyampaikan antara lain sebagai berikut:
 - a. Sejak awal penetapan PON di Papua, PT. Freeport sudah berkomitmen untuk mendukung dan mensukseskannya. Komitmen PT. Freeport, selain membangun Kota Kuala Kencana, pembangunan bandara dan landasannya, PT Freeport juga mengalokasikan Rp.330 Milyar untuk membangun fasilitas untuk dukungan PON XX di Mimika. Di Kuala Kencana, nanti juga akan menggelar lari marathon dan jalan cepat, sementara bandara akan digunakan untuk terbalng layang dan aeromodelling.
 - b. Anggaran dukungan PT Freeport untuk PON XX Papua tidak dari bersumber CSR, namun memang murni untuk mendukung pelaksanaan PON Papua. Sementara CSR PT. Freeport tetap terlaksana tanpa terganggu oleh anggaran dukungan kepada pelaksanaan PON XX Papua.

Hasil pembangunan kompleks olahraga oleh PT. Freeport akan dihibahkan kepada Pemda setelah pelaksanaan PON XX Papua.

- 4) Pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga RI menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Dr. Jonni Mardizal, M.M. menyampaikan harapannya agar ada kekompakan antara Pemda, organisasi olahraga, dan masyarakat dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan PON XX Papua. Terkait perkembangan infrastruktur PON XX Papua, terdapat situs/aplikasi yang dapat memantau perkembangannya. Diharapkan, PON XX Papua dapat berjalan sukses secara prestasi, ekonomi, administrasi, dan aman nyaman.
 - b. Hj. Suryati, S.Sos. M.Si. menyampaikan bahwa pencairan dukungan kebutuhan akomodasi dan konsumsi PON XX Papua sempat terkendala aturan PMK yang perlu diubah dan direvisi termasuk Peraturan Menteri. Juklak-juknis pelaksanaannya juga ada penyempurnaan terkait penyaluran anggaran PON XX. Diharapkan penyaluran anggaran dapat segera terlaksana.
 - c. Drs. Maifrizon, M.Si. menyampaikan bahwa Kemenpora RI mengupayakan sinergi dengan Dispora Mimika dan Papua dalam mempersiapkan penyemarakan PON XX Papua dari potensi budaya masyarakat lokal.

- 5) Tanggapan Anggota Komisi X DPR RI disampaikan antara lain sebagai berikut:
 - a. Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, menyampaikan antara lain: (1) bahwa saat ini telah ada Perpres Desain Olahragana Nasional (Perpres No. 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional) untuk pengembangan olahraga, pendanaan dan tata kelola infrastruktur olahraga. (2) saat ini masih terdapat persoalan yang masih perlu segera dibenahi dalam mendukung pelaksanaan PON XX Papua, diantaranya masih kurangnya akses flight pesawat yang masih terbatas.
 - b. Ferdiansyah, S.E., M.M. menyampaikan antara lain perlunya penekanan pada sukses administrasi dalam pelaporan keuangan baik dr APBN dan APBD. Sukses administrasi tersebut juga diikuti sukses lainnya seperti sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi. Selain sukses tersebut, juga perlu sukses solidaritas. Sedangkan sukses ekonomi diperlukan memicu pemulihan ekonomi. Sukses Pemajuan kebudayaan dalam bentuk atraksi-atraksi budaya juga perlu dicapai melalui pelaksanaan PON XX Papua. Tidak kalah penting adalah Sukses pemberdayaan olahraga rekreasi.
 - c. MY Esty Wijayati, menekankan perlunya mulai meningkatkan eforia masyarakat terkait menyambut pelaksanaan PON XX Papua. Diharapkan, pelaksanaan PON XX tersebut, berdampak secara ekonomi bagi masyarakat, dan ada akses keterlibatan masyarakat. Selain itu, PON Papua juga harus dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Sedangkan pencairan anggaran kebutuhan teknis dari pemerintah pusat, harus segera disalurkan.
 - d. Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si. menyampaikan dukungan ekonomoi kreatif segera harus mulai dipersiapkan, seperti kaos, buah tangan, dll. sesuai dengan tema PON XX. Pelaksanaan PON di Papua harus

diperuntukkan untuk mewujudkan nasionalisme masyarakat. Selain itu, perlu ada dukungan peribadatan dalam kompleks olahraga seperti Masjid dan Gereja. *Sport tourism* juga mulai perlu digaungkan bersama organisasi olahraga, masyarakat dan K/L lain seperti Kemenparekraf/Baparekraf RI.

Kunjungan lapangan di Mimika Sport Complex (MSC):

- 1) Mimika Sport Complex merupakan kompleks olahraga yang dibangun PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai dukungan pada pengembangan olahraga di Mimika serta pelaksanaan PON XX Tahun 2021.
- 2) MSC berdiri di atas lahan seluas 12,5 hektar milik Pemerintah Kabupaten Mimika. MSC terdiri atas:
 - a. stadion indoor: arena bagi cabang olahraga bulu tangkis, basket, dan voli. dirancang untuk dapat menampung 5.500 penonton, termasuk 75 penonton VIP, serta dilengkapi dengan area pertokoan dan perkantoran.
 - b. stadion outdoor: dilengkapi dengan jalur lari jarak pendek dan menengah berstandar internasional serta sejumlah cabang atletik lainnya, seperti lempar lembing, tolak peluru, dan lompat jauh. Stadion ini memiliki 2 tribun utama, yaitu di bagian barat berkapasitas 2.200 penonton dan bagian timur berkapasitas 1.300 penonton.
 - c. asrama atlet: tersedia 2 asrama yang masing-masing mampu menampung 50 atlet dan 7 pelatih. Asrama ini juga dilengkapi fasilitas rekreasi (*fitness/gym*) yang terdapat di dalam asrama penunjang (*support dormitory*).
- 3) Pembangunan MSC telah rampung pada 2016 dan akan diserahkan oleh PTFI kepada Pemda Mimika.

III. KESIMPULAN

- a. Pemda Kabupaten Mimika sejak tahun 2016 telah merealisasikan anggaran Rp.1,6 Triliun untuk membangun infrastruktur fasilitas pertandingan. Sedangkan PT. Freeport telah menghabiskan Rp.330 Miliar untuk membangun infrastruktur fasilitas pertandingan. Infrastruktur pertandingan yang disiapkan di Kabupaten Mimika akan digunakan untuk menggelar sekitar 150 pertandingan dari 39 Cabang Olahraga.
- b. Terkait dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat (APBN), masih terdapat kendala pencairan anggaran untuk akomodasi dan lain-lain sebesar Rp.1,4 Triliun yang diperkirakan akan dapat diselesaikan sebelum 23 September 2021. Kendala tersebut berasal dari aturan PMK yang perlu diubah dan direvisi termasuk Peraturan Menteri. Aturan tersebut juga membutuhkan Juklak-Juknis pelaksanaannya yang perlu penyempurnaan.
- c. Pemerintah Kabupaten Mimika, Panitia PON XX di Mimika dan pemangku kepentingan lainnya, telah berkomitmen mendukung sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, dan sukses ekonomi masyarakat melalui pembukaan tempat bagi UMKM dan Ekraf di lokasi pertandingan. Dalam upaya membangkitkan atmosfer PON XX di masyarakat, hingga saat ini, masih terdapat kendala pengadaan atribut seperti spanduk dan baliho pendukung sosialisasi PON di Mimika yang mahal dan lambat.

- d. *Mimika Sport Complex* yang dibangun PT. Freeport Indonesia, segera setelah PON XX Papua selesai, akan diserahkan/dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk sepenuhnya dimanfaatkan bagi perkembangan olahraga daerah.

IV. REKOMENDASI

- a. Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan pemangku kepentingan PON XX Papua untuk memastikan kelancaran realisasi anggaran akomodasi yang masih terkendala oleh aturan PMK yang perlu diubah maupun penyempurnaan Juklak-Juknis pelaksanaan, agar penyelenggaraan PON XX Papua tidak terganggu.
- b. Komisi X DPR RI mendorong Pemkab Mimika, PB PON XX Papua di Mimika, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk lebih maksimal dalam upaya membangkitkan atmosfer dan gairah masyarakat Mimika dalam menyambut PON XX Papua di Timika.
- c. Komisi X DPR RI mendesak Pemkab Mimika untuk menyiapkan peta pengelolaan dan pemanfaatan *Mimika Sport Center* bagi peningkatan prestasi olahraga daerah, pasca penyelenggaraan PON XX Papua dan hibah dari PT. Freeport Indonesia.

V. PENUTUP

Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Mimika Provinsi Papua, sebagai bahan masukan bagi semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 13 September 2021

**Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI**

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP
A-338